



Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah sesuai PSAP 71 tentang standar akuntansi pemerintahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Husnawati¹✉, Rina Zahara¹, Devina¹, Teuku Zulkarnain¹

Manajemen keuangan sektor publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia⁽¹⁾

DOI: [10.31004/jutin.v8i1.40315](https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40315)

✉ Corresponding author:
[rinazahara909@gmail.com]

Info Artikel

Abstrak

Kata kunci:

*Laporan keuangan daerah;
PSAP 71;
Badan pengelolaan keuangan daerah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam konteks kesesuaian dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 71. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 71) mengatur laporan keuangan pemerintah daerah, fokus pada pengungkapan terkait asset tetap. Tahapan evaluasi mencakup penilaian kepatuhan terhadap standar serta kualitas informasi yang disajikan, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Dengan adanya PSAP 71, diharapkan laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan dan bermanfaat. Metodelogi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan Daerah di Provinsi Aceh telah disusun dengan mengacu pada PSAP 71, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip akuntansi. Misalnya, dapat berupa penilaian asset tetap yang tidak diperbarui, sehingga nilai yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Berdasarkan analisis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pengembangan sistem informasi akuntansi yang lebih baik dan terintegritas untuk mempermudah proses pengumpulan dan penyajian data keuangan.

Abstract

This study aims to evaluate the presentation of local financial statements at the Aceh Financial Management Agency office in the context of conformity with the guidelines of Government Accounting Standards (PSAP) 71. Statement of Government Accounting Standards (PSAP 71) regulates local government financial statements, focusing on disclosures related to fixed assets. The evaluation phase includes an assessment of compliance with the standard as well as the quality of the information presented, with a focus on transparency and accountability in asset management. With the existence of PSAP 71, it is expected that financial statements can present relevant, reliable and useful information. This research methodology uses a qualitative approach with data collection techniques. This research was conducted in the time span of 2022-2023. The results showed that although the Regional financial statements in Aceh

Keywords:
*Regional financial statements;
PSAP 7;
Regional financial management agency*

Province had been prepared with reference to PSAP 71, there were still some discrepancies in the application of accounting principles. For example, it can be in the form of fixed asset valuations that are not updated, so that the reported values do not reflect the actual conditions. Based on the analysis, this study recommends several corrective measures. First, the development of a better and integrated accounting information system to facilitate the process of collecting and presenting financial data.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, akuntansi sektor publik mengalami transformasi yang signifikan, seiring dengan peningkatan perhatian terhadap praktik akuntansi di lembaga pemerintah dan organisasi publik lainnya. Perubahan ini bukan hanya sekadar tuntutan administratif, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PSAP 71 menjadi pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh berbagai pemangku kepentingan. (Septian, 2021)

Akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dari entitas pemerintah. Laporan keuangan ini menjadi sumber informasi yang vital bagi pengambil keputusan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas, investor, dan masyarakat luas. PSAP 71 menetapkan kerangka kerja bagi penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual, yang diharapkan dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan antarperiode dan antarentitas, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. SAP Berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan equitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, beban, asset, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan equitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (PP No.71 tahun 2010).

Penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu mencerminkan tanggung jawab pengelola keuangan daerah. Laporan keuangan yang disusun dengan baik tidak hanya memenuhi aspek transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam konteks ini, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan PSAP 71. Dengan menerapkan standar ini, diharapkan laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja anggaran daerah, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih efektif. (Malisa, 2022)

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi standar ini. Beberapa entitas pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyusun kebijakan akuntansi yang sesuai, sering kali hanya menyalin pedoman tanpa memahami substansi yang diperlukan. Ketidaksesuaian antara penyajian laporan keuangan dan regulasi yang berlaku seringkali menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas laporan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang prinsip akuntansi berbasis akrual di kalangan pegawai juga menjadi kendala dalam penerapan PSAP 71. Oleh karena itu, evaluasi penyajian laporan keuangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait penerapan PSAP 71, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, masih banyak yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penyajian laporan keuangan daerah sesuai PSAP 71 di Aceh, guna memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai penyajian laporan keuangan di instansi pemerintah Aceh, agar dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Sebuah sistem akuntansi yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dari penelitian sebelumnya maka diperlukan evaluasi mendalam mengenai penyajian laporan keuangan di instansi pemerintah Aceh, dengan fokus pada pengungkapan informasi aset tetap dan penerapan PSAP 71. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan laporan keuangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan PSAP 71, mengidentifikasi sejauh mana laporan keuangan daerah di BPKA yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan dalam standar

PSAP 71, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai PSAP 71.

Sumber data

Sumber data terdiri data sekunder yang diambil dari dokumen resmi seperti laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk mendalami proses penyusunan laporan dan tantangan yang dihadapi, serta studi dokumentasi untuk menilai kesesuaian laporan dengan PSAP 71. Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selama periode 2022-2023.

Metode dan proses analisis

Setelah data terkumpul, langkah pertama dalam analisis adalah mentranskripsi dan mengorganisir informasi dari wawancara untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, data akan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti kepatuhan terhadap PSAP 71, tantangan dalam penyajian laporan, dan kualitas informasi yang disajikan.

Analisis ini juga melibatkan interpretasi terhadap data yang telah dikategorikan, untuk mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan memenuhi standar yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan dokumen resmi yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi penyajian laporan keuangan daerah dan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian Laporan Realisasi anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pada bagian lampiran penjelasan pos pos Laporan keuangan.

Dalam penyajiannya pendapatan LRA dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (cash basic) dimana pendapatan di akui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja di akui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas Umum Daerah atau oleh entitas Pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerima di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai ekuitas.
2. Belanja, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara.
3. Sisa lebih/ kurang pembayaran Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa Lebih kurang pembayaran dicatat sebesar selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENDAPATAN-LRA	5.1.1	2,853,177,437,034.00	298,718,869,220,388.00	104.70	2,917,145,003,051.96
PENDAPATAN ASLI ACEH	5.1.1.1	2,853,177,437,034.00	298,718,869,220,388.00	104.70	2,917,145,003,051.96
Pendapatan Pajak Aceh	5.1.1.1.1	1,789,594,976,388.00	1,791,227,845,430.00	100.09	1,717,834,522,320.10
Pendapatan Retribusi Aceh	5.1.1.1.2	14,277,225,253.00	16,462,009,498.00	115.30	15,000,911,792.00
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh	5.1.1.1.4	796,581,433,700.00	926,775,035,583.05	116.34	1,004,447,023,784.33
BELANJA	5.1.2	9,863,468,989,194.00	9,597,050,467,983.03	97.30	12,726,436,523,632.39
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	8,094,074,034,684.00	7,920,985,964,478.68	97.86	9,853,395,736,247.38

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2,810,065,283,664.00	2,777,232,840,075.00	98.83	2,672,636,562,974.99
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	4,000,024,822,724.00	4,023,048,182,624.39	100.58	5,961,654,335,729.95
BELANJA MODAL	5.1.2.2	1,740,133,476,500.00	1,676,030,003,504.35	96.32	2,868,705,757,385.01
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	494,578,526,515.00	485,458,694,474.00	98.16	345,149,313,314.57
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	534,194,790,197.00	519,361,756,751.21	97.22	827,643,754,161.76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	562,993,054,711.00	551,432,860,935.14	97.95	1,519,021,873,142.68
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	139,765,386,591.00	112,344,877,028.00	80.38	130,967,619,803.00
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.3	(1,252,097,602,450.00)	(782,307,674,089.24)	62.48	(2,059,494,018,449.67)

Sumber : Laporan Keuangan Badan pengelolaan keuangan Aceh 2023

Penyajian laporan perubahan Ekuitas Pada Badan pengelolaan Keuangan Aceh

1. Laporan Perubahan ekuitas menyajikan sekurang kuranya pos posEkuitas Awal
2. Surplus/defisit-LO Pada periode bersangkutan
3. Koreksi koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasarkan, Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN		2023	2022
Ekuitas awal		33,505,370,933,088.00	31,331,114,695,220.60
Surplus/defisit - LO		(944,592,101,498.22)	(21,739,521,279.41)
Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar :		(252,232,007,131.00)	2,795,995,759,146.77
Koreksi/penyesuaian persediaan		(2,644,208,492.60)	-
Selisih Revaluasi aset tetap		42,095,348,822.76	46,099,715,766.70
Ekuitas Akhir		32,347,997,964,788.90	33,551,470,648,854.70

Sumber : Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 2023

Penyajian Neraca pada Badan pengelolaan keuangan Aceh

Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di kas Aceh	396,396,186,019.05	1,168,230,318,850.91
Kas di bendahara penerimaan	1,177,711,672.01	891,867,239.31
Kas di bendahara pengeluaran		
Kas di BLUD	75,696,236,366.54	135,341,613,867.81
Kas lainnya	801,836,819.00	71,539,000.00
Piutang pajak	43,184,107,177.00	42,490,918,229.00
Piutang restribusi	593,692,460.33	833,261,304.00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8,869,168,610.86	8,869,168,610.86
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	174,672,732,346.00	152,324,063,109.85
Jumlah aset lancar	701,391,671,470.79	1,509,052,750,211.74

INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi non permanen		
Investasi jangka panjang pada entitas lainnya	0	0
investasi dalam obligasi	0	0
Jumlah Investasi Nonpermanen	0	0
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	2,684,124,948,748.24	2,598,499,040,602.30
Investasi permanen lainnya	0	0
Jumlah Investasi Jangka Panjang	2,684,124,948,748.24	2,598,499,040,602.30
ASET TETAP		
Tanah	6,991,264,621,559.09	6,926,200,775,612
Peralatan dan mesin	5,364,666,848,658.62	4,924,064,223,948
Gedung dan bangunan	8,572,830,860,479.07	7,979,700,524,271
Jalan, irigasi dan jaringan	16,458,413,857,347.50	13,585,012,102,818
Aset tetap lainnya	1,064,575,207,314.36	984,331,745,325
Konstruksi dalam penggerjaan	1,519,189,947,244.96	3,659,064,347,309
Akumulasi penyusutan	-15,743,203,754,420.40	-13,837,197,606,040
Jumlah aset tetap	24,227,737,588,183.10	24,221,176,113,243.50
DANA CADANGAN		
Dana cadangan	1,403,931,328,766.30	1,354,580,012,567.35
Jumlah dana cadangan	1,403,931,328,766.30	1,354,580,012,567.35

NERACA PER 31 DESEMBER 2023 2022 (lanjutan)		
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	25,467,078,307.43	25,559,094,461.43
Aset Tak Berwujud	73,753,026,217.43	68,921,441,767.43
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-54,181,022,758.55	-45,032,331,482.50
Aset Lain-lain	3,152,319,439,976.84	3,466,117,214,166.01
Jumlah aset	3,197,358,521,743.15	3,515,565,418,912.37
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	731,836,819.00	354,013,596.00
Utang Belanja	792,255,083,271.37	446,842,466,978.73
Utang Jangka Pendek Lainnya	127,046,989,183.00	129,372,536,263.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	920,033,909,273.37	576,569,016,837.73
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang lainnya	0	0
Jumlah kewajiban jangka panjang	0	0
	920,033,909,273.37	576,569,016,837.73
EKUITAS		
Ekuitas	32,308,546,824,458.70	33,505,370,933,088.00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	33,228,580,733,732.10	34,081,939,949,925.70

Sumber: Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Aceh 2023

Catatan atas Laporan keuangan

Menguraikan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA, serta Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Kebijakan Akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang Penjelasan atas Pos-Pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan, Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjenyi yang mempengaruhi Laporan Keuangan, serta Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan.

Perbandingan penyajian laporan keuangan pada Pendapatan dengan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP 71)

No	Komponen	Badan pengelolaan keuangan Aceh	PSAP 71	Keterangan
1	Tujuan	menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan alokasi anggaran dan sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh.	menyajikan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.	Sudah sesuai
2	Laporan keuangan	1.Laporan Realisasi Anggaran 2.laporan perubahan saldo 3.laporan Operasional 4.Laporan perubahan Ekuitas 5.Neraca 6.Catatan Atas Laporan Keuangan	1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan Saldo 3.Anggaran lebih 4.Laporan perubahan Ekuitas 5.Laporan Arus Kas 6.Laporan Operasional 7.Neraca 8.Catatan atas laporan keuangan	Sudah sesuai
3	Laporan Realisasi Anggaran	menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.	menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.	Sudah sesuai
4	Laporan operasional	menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Aceh.	Menyajikan informasi laporan operasional mencakup informasi mengenai pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dalam operasi normal pemerintah.	Sudah sesuai
5	Laporan arus kas	memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD.	-	Tidak membuat laporan arus kas
6	Laporan perubahan Ekuitas	menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Aceh yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2023.	Menyajikan informasi laporan mengenai ekuitas awal, surplus/defisit-LO,koreksi dan ekuitas akhir.	Sudah sesuai
7	Neraca	Menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada akhir periode.	Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	Sudah sesuai
8	Laporan Perubahan saldo	menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2023 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir	-	Tidak membuat laporan perubahan saldo.
9	Catatan atas laporan keuangan	Meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,Laporan perubahan operasional,laporan perubahan ekuitas, Neraca.	Meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,Laporan perubahan operasional,laporan perubahan ekuitas, Neraca.	Sudah sesuai

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini telah mengevaluasi penyajian laporan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai dengan PSAP 71. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar yang berlaku, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, terutama dalam penilaian aset tetap yang tidak diperbarui. Hal ini berpotensi mengurangi akurasi informasi yang disajikan dan dapat mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sangat penting bagi instansi terkait untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang lebih baik dan terintegrasi. Sistem yang efisien akan mempermudah pengumpulan dan penyajian data keuangan yang akurat. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi pegawai mengenai prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual juga menjadi hal yang krusial. Dengan pemahaman yang lebih baik, pegawai dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melakukan audit internal secara berkala juga bisa menjadi langkah positif untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAP 71. Audit ini tidak hanya membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disajikan. Akhirnya, penting untuk terus memantau implementasi PSAP 71 agar laporan keuangan daerah tetap relevan dan berkualitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Aceh dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Keuangan Aceh. (2023). *Laporan Keuangan Tahunan 2022*. Banda Aceh: BPKA.
- Lestari, F. (2023). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai PSAP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di kantor Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1211-1221.
- Malisa, Malisa, Afrah Junita, and Iqlima Azhar. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3.2 (2022): 1016-1027.
- Oktavianus, A (2022) Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas pekerjaan umum dan penata ruang kota manado. *Jurnal LPPM EkoSosBudKum*. Vol 5 no 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosbudkum/article/view/37934>. Diakses pada 12 oktober 2024.
- Purnamasari, A. (2020). *Pengaruh Pelatihan terhadap Penerapan PSAP 71 di Instansi Pemerintah*. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 18-30.
- Putra, M. (2021). *Kualitas Laporan Keuangan di Kota Bengkulu: Tinjauan terhadap PSAP 71*. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 8(2), 99-110.
- Rosana, Lina, and Risma Wira Bharata. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan." *Jurnalku* 3.1 (2023): 23-34.
- Sayidah. (2021). *Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(3), 234-248.
- Wiratna Sujarweni. (2022). *Penerapan PSAP 71 dalam Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.